



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAMBI**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini merupakan instrumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi di bidang pertanian dan perkebunan.

Renstra ini disusun melalui proses analisis strategis terhadap isu-isu utama pembangunan perkebunan, penjabaran tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, serta penetapan indikator kinerja utama yang mencerminkan komitmen Dinas Perkebunan dalam mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, keberlanjutan usaha perkebunan, dan kesejahteraan petani.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik melalui data, pemikiran, maupun partisipasi aktif dalam forum perencanaan. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat dan operasional dalam mewujudkan tata kelola pembangunan perkebunan yang inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jambi.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan, dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mendorong kemajuan subsektor perkebunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada petani.

Jambi, 15 September 2025

KEPALA DINAS,



HENRIZAL, S.Pt., M.M

NIP. 19710911 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Kelompok Sasaran Layanan	34
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan	36
2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.6 Isu Strategis	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	59
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	63
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	64
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	69
BAB V PENUTUP	92

Tabel 1 Daftar Sarana Prasarana Tahun 2025 _____	24
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah _____	26
Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD _____	27
Tabel 4 Nilai Tukar Usaha Petani _____	33
Tabel 5 Luas Perkebunan 7 (Tujuh) Komoditi Unggulan _____	35
Tabel 6 Luas Tanaman Tanaman Rusak Komoditi Unggulan _____	37
Tabel 7 Produksi Perkebunan 7 (Tujuh) Komoditi Unggulan _____	38
Tabel 10 Strategis yang ditempuh _____	50
Tabel 11 Tinjauan Kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2025-2029 _____	56
Tabel 12 Tujuan dan Sasaran RENSTRA _____	62
Tabel 13 Penahapan RENSTRA _____	67
Tabel 14 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA _____	68
Tabel 15 Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA _____	75
Tabel 16 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan _____	79
Tabel 17 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas _____	84
Tabel 18 Indikator Kinerja Utama _____	90
Tabel 19 Indikator Kinerja Kunci _____	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan _____	20
Gambar 2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan_____	20
Gambar 3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin__	21
Gambar 4. Struktur Organisasi _____	23
Gambar 5. Grafik Rasio Pencapaian Kinerja_____	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan subsektor perkebunan diarahkan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional, serta mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan ke depan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025- 2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi setiap tahunnya selama periode 5 (lima) tahunan kedepan.

Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul (Inpres. RI. Nomor 7 Tahun 1999). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat juga dilakukan evaluasi yang terkait dengan 3 (tiga) hal pokok, yaitu ; kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan untuk melakukan perubahan terhadap substansi Renstra Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja Perangkat Daerah kedepannya.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan seluruh perencanaan pembangunan, baik perencanaan daerah maupun perencanaan perangkat daerah, diawali dan diakhiri tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, terjadi perubahan kebijakan nasional dan kasus pandemi covid 19 yang berkonsekuensi pada perlunya daerah melakukan perubahan pada dokumen RPJMD Provinsi Jambi, selaras dengan diterbitkannya PermenPANRB-RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan dalam upaya mendorong percepatan pencapaian peringkat Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori “BB”, begitu juga implementasi program dan kegiatan didalam Renstra dinas Perkebunan tahun 2025 s/d 2029 dihadapkan kepada

berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya, terjadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh.

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menjadi sangat penting karena merupakan bahan masukan untuk penyusunan Rencana akhir kegiatan untuk mengetahui dimana organisasi saat ini berada, arahan kemana organisasi harus menuju, bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang disepakati dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan, menjadi instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Tupoksi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sebagai pedoman dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan untuk periode tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI. Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.
22. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/Hk.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045
27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
30. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17, 18, 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
32. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat berkaitan dengan dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan sebagai dokumen Perencanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2025- 2029 berdasarkan tupoksi yang diamanatkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, adalah :

- a) Tersusunnya strategi, tujuan dan kebijakan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b) Tersusunnya rancangan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang;
- c) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian sub sektor perkebunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian sub sektor perkebunan yang berkualitas dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meliputi uraian secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perkebunan, fungsi Renstra Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, keterkaitan Renstra Dinas Perkebunan dengan RPJMD, dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Meliputi penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perkebunan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Meliputi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Meliputi uraian tentang sistematika penulisan Renstra Dinas Perkebunan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perkebunan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perkebunan ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perkebunan, struktur organisasi Dinas Perkebunan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perkebunan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perkebunan ditujukan untuk menunjukkan organisasi.

2.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perkebunan periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan/atau indikator lainnya. Kinerja pelayanan perkebunan dimaksud meliputi kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB

Provinsi Jambi, serta kondisi luas lahan, produksi dan produktivitas terutama untuk komoditas-komoditas utama perkebunan. Pada bagian ini dijelaskan juga mengenai kondisi serapan tenaga kerja serta NTP dan NTUP sub sektor perkebunan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini dikemukakan Kelompok Sasaran Layanan dan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi isu-isu strategis pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini diulas tentang rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategis dan Arah kebijakan jangka menengah Dinas Perkebunan, dimana tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu kedepan serta arah kebijakan dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif serta pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Penyelenggaraan Dinas Perkebunan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan menjelaskan kesimpulan, kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas Perkebunan terhadap pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standarisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sertifikasi dan Mutu benih, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan, serta pengembangan pembibitan tanaman perkebunan;
3. Pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan supervisi di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;

5. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan Provinsi;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang terkait;
7. Penyampaian laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui sekretaris daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 bagian Sekretariat dan 4 bidang teknis serta 3 UPTD, sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17, 18, dan 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1. Sekretariat

Tugas pokoknya adalah; membantu dinas dalam rangka pengoordinasian, penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, dan administrasi umum serta kepegawaian lingkup dinas dan sekretariat.

Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan perencanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.

- c. Pengawasan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi serta keuangan dan aset.
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program dan evaluasi dan keuangan dan aset.
- e. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran pembangunan.
- f. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang lain dan UPTD.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh ;

- a. Sub.bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub.bagian Program dan Evaluasi
- c. Sub.bagian Keuangan dan Aset

2. Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan

Tugas bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan produksi tanaman perkebunan. Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategi Pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- b. Pelaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan di bidang produksi benih, tanaman semusim, rempah penyegar, penyegar dan tanaman tahunan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi benih, budidaya tanaman semusim, rempah, penyegar dan tanaman tahunan.
- d. Pengelolaan kebun sumber daya genetik (SDG) Tanaman Perkebunan.
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- f. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD dan,
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Perbenihan
- b. Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
- c. Seksi Tanaman Tahunan.

3. Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan

Tugas bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan. Sedangkan fungsinya sebagai:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya Perkebunan.
- b. Pelaksanan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.

- c. Pelaksanakan kebijakan, pembinaan, pengawasan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan serta penataan sumber daya perkebunan.
- e. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaku usaha perkebunan.
- f. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesian sustainable palm oil (ISPO).
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- h. Penyusunan pertimbangan teknis bahan rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan untuk izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) dan izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P).
- i. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- k. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan penyuluhan perkebunan sebagai pertanggungjawaban dan,
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengembangan perkebunan, terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Sumberdaya Perkebunan.
- b. Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi
- c. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.

4. Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan

Tugas bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, prasarana dan sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisasi pengganggu tanaman, pengelolaan lahan dan air. Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategis pembinaan dan pengawasan Pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- c. Pelaksanan evaluasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan, pengelolaan lahan dan air.
- d. Pelaksanaan pengawasan regulasi bidang perkebunan oleh (penyidik pegawai negeri sipil PPNS).
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang lain serta UPTD.
- h. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
- i. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebunan sebagai pertanggungjawaban.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan lahan dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Seksi Pupuk, Pestisida dan Prasarana Sarana Perkebunan
- b. Seksi Penanganan Gangguan usaha dan OPT Perkebunan
- c. Seksi Pengelolaan lahan dan air.

5. Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Tugas bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu serta pemasaran hasil Perkebunan. Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- b. Pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil perkebunan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan pengolahan, standardisasi dan pengawasan mutu, serta pemasaran hasil Perkebunan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan unit pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- f. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan harmonisasi penerapan standar mutu hasil perkebunan.
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
- h. Pengaturan tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang dan UPTD.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengolahan, Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
- b. Seksi Standardisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan
- c. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No.17 Tahun 2018, No.18 Tahun 2018 dan No.19 Tahun 2018, Dinas Perkebunan memiliki tiga (3) UPTD yaitu:

1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian mutu benih dan mengawasi peredarannya, memberikan bimbingan pengawasan dan pengembangan mutu benih. Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. pelaksanaan pengawasan peredaran dan mutu sumber benih.
- b. pelaksanaan pendataan potensi dan penyaluran benih.
- c. pelaksanaan pemeriksaan bahan penilaian izin usaha produksi benih.
- d. pelaksanaan evaluasi usaha produksi benih;.
- e. pelaksanaan pemeriksaan dokumen benih dan mengklarifikasi dengan sumber benih;
- f. pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu benih;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. pengoordinir tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP)

Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perkebunan dibidang pengujian dan pengembangan teknis perlindungan Perkebunan. Sedangkan fungsinya sebagai ;

- a. perencanaan program kerja dan anggaran UPTD BPTP;.
- b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan perkebunan;
- d. pengkajian bahan petunjuk teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait lingkup dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) Sei Tiga.

Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) dinas Perkebunan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018, yang berkedudukan di desa Sei Tiga Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. UPTD-BPPBTP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dalam peningkatan dan ketersediaan benih unggul tanaman perkebunan pada dinas. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. perumusan program kerja UPTD BPPBTP;
- b. pelaksanaan pengendalian teknis operasional penyediaan benih, penyaluran dan pemasaran benih;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi teknis terkait bidang tugasnya;
- d. penyediaan benih tanaman perkebunan;
- e. pengkoordinasian penyaluran benih tanaman perkebunan dengan bidang terkait;
- f. pelaksanaan pemasaran benih tanaman perkebunan atas persetujuan kepala dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jabatan Fungsional

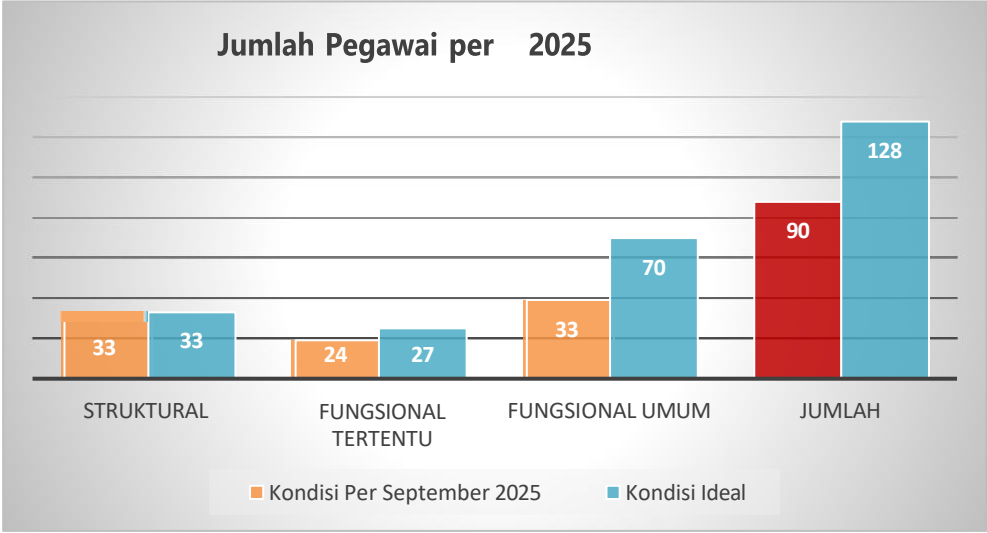
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. Sampai tahun 2025 jumlah tenaga Fungsional Teknis dinas Perkebunan Provinsi Jambi tersedia 24 orang PNS yang tersebar pada setiap bidang, yang meliputi ; 10 orang Fungsional Penyuluh Pertanian, 1 orang Analis Pasar, 4 orang Pengawas Benih Tanaman dan 6 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian, 1 orang POPT dan 2 orang Fungsional Perencana.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

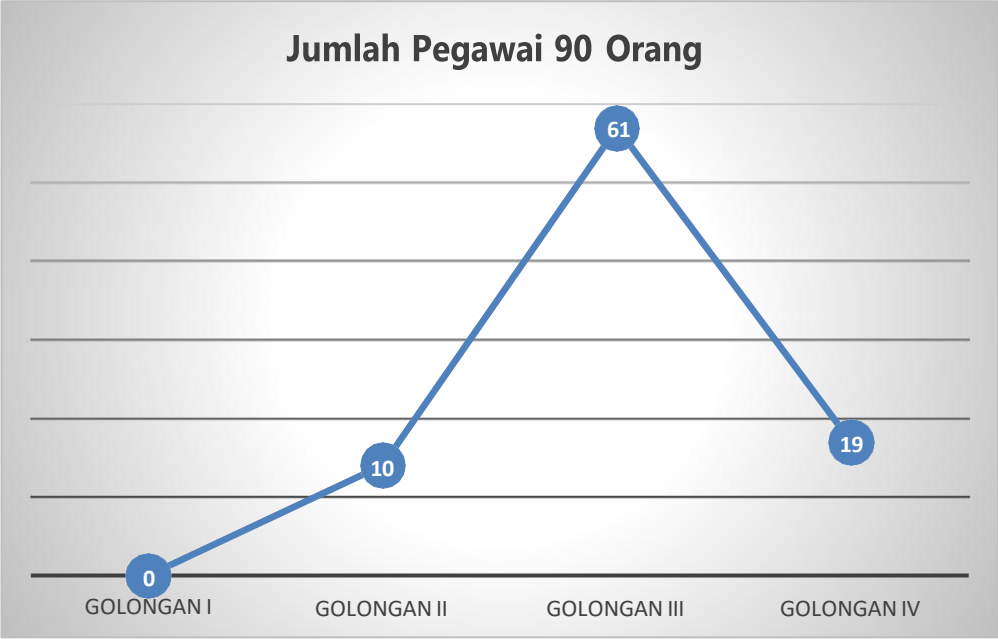
Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan yang menjalankan pembangunan sub sektor perkebunan di Jambi terdiri dari Petani Pekebun, Pengusaha Perkebunan, Tenaga Penyuluh, Aparatur Pemerintah, serta berbagai pihak pemerhati dunia perkebunan. Semua komponen SDM pembangunan perkebunan Jambi tersebut sejauh ini selalu menjalin kerjasama secara terpadu dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi sesuai harapan bersama.

SDM Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sampai dengan Juni 2025, tercatat sebanyak 194 pegawai yang terdiri 82 orang ASN 8 orang PPPK dan 104 Non ASN. Untuk 82 orang ASN meliputi ; 33 pejabat struktural, fungsional teknis dinas perkebunan provinsi jambi tersedia 24 orang PNS yang tersebar pada setiap bidang, yang meliputi ; 10 orang Fungsional Penyuluh Pertanian, 1 orang Analis Pasar, 4 orang Pengawas Benih Tanaman dan 6 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian, 1 orang POPT dan 2 orang Fungsional Perencana dan 33 orang Fungsional Umum. Profil Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Gambar 1.1. Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025



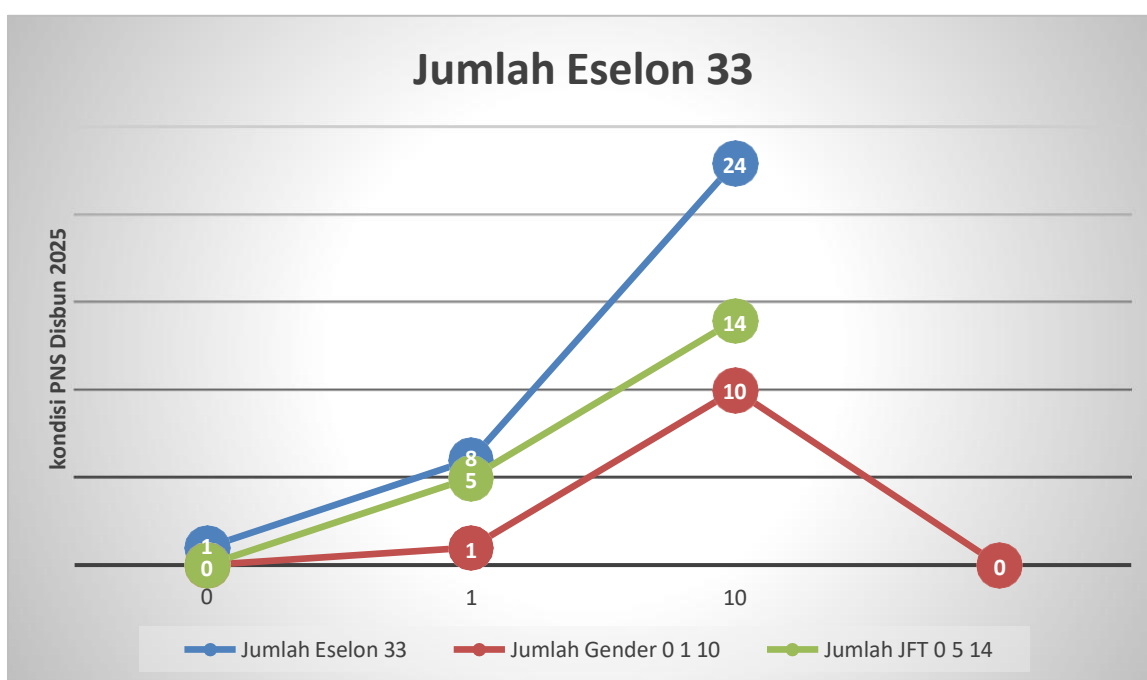
Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan



Berdasarkan 2 (dua) grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai dinas Perkebunan tahun 2025 Struktural terpenuhi 33 orang dari kebutuhan sebanyak 33 orang, jabatan Fungsional Tertentu baru terpenuhi 24 orang dari jumlah kebutuhan sebanyak 27 orang, begitu juga dengan jabatan Fungsional Umum baru terpenuhi 29 orang dari jumlah kebutuhan sebanyak 70 orang artinya masih diperlukan sebanyak 41 orang lagi. Bila kebutuhan jabatan tersebut telah terpenuhi sesuai dengan jumlah kebutuhan, maka dapat memberikan kinerja secara maksimal.

Berikut ini Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Perkebunan Provinsi Jambi :

Gambar 1.3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025



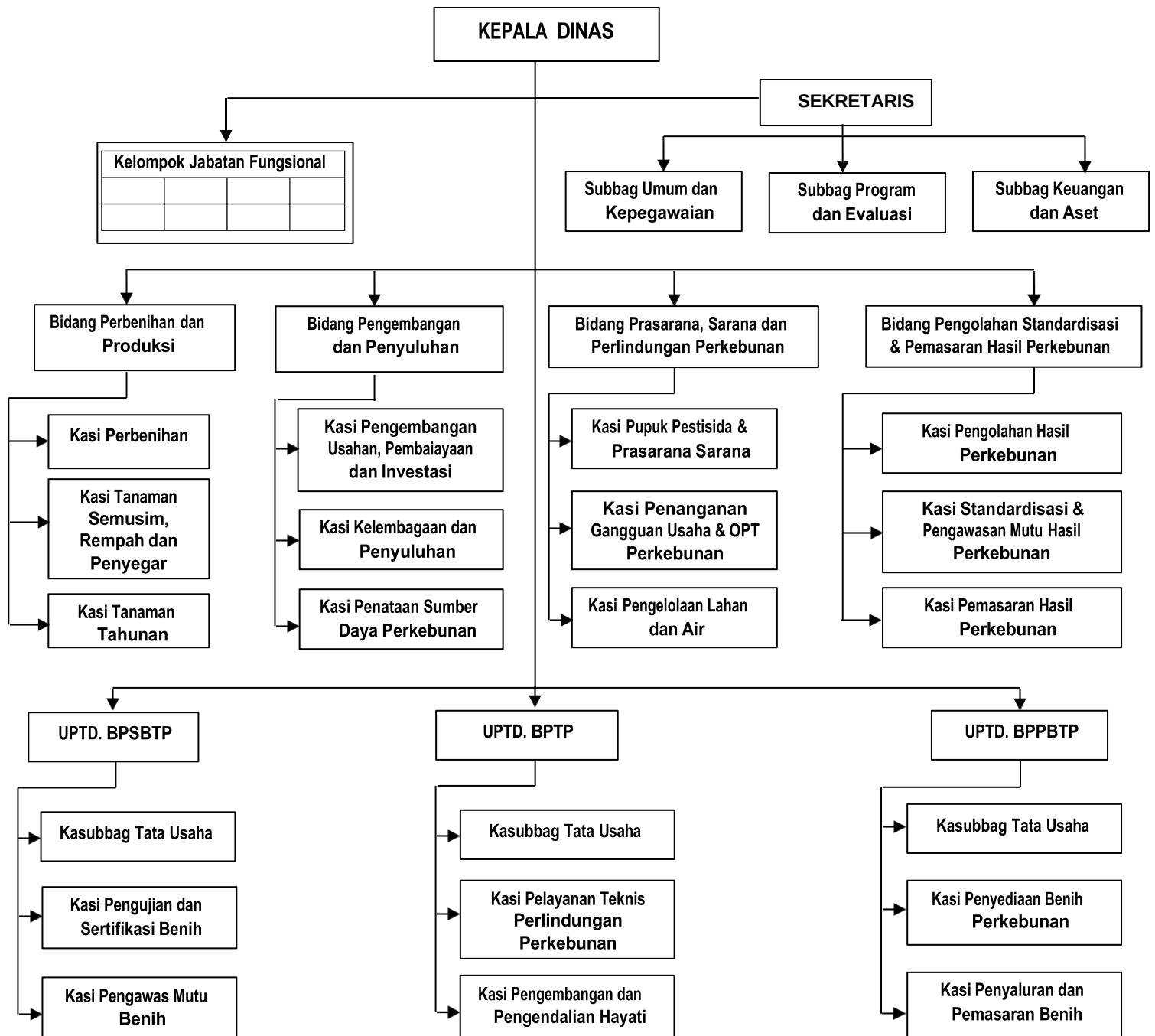
Dari grafik di atas, bahwa terkait kesetaraan Jender di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dijelaskan bahwa tahun 2025 jumlah PNS kaum Perempuan yang menduduki jabatan Struktural sebanyak 1 orang eselon III dan 10 orang eselon IV, untuk jabatan Fungsional Tertentu tersedia 14 orang.

Atau sekitar 45 % kaum Perempuan menduduki eselon III dan IV, dan sekitar 73,68 % sebagai Fungsional Tertentu (Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Hasil Perkebunan, dan Pengawas Benih Tanaman), maka dapat dikatakan bahwa Gender di dinas Perkebunan sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya sudah memenuhi kuota Kesetaraan Gender.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 sebanyak 66 orang, sedangkan Sarjana S2 13 orang dan SMA 11 Orang. Sementara terkait dengan jabatan fungsional tertentu (JFT) membutuhkan tingkat pendidikan sarjana yang memiliki kapabilitas yang tinggi.

Selanjutnya susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI**



Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sejauh ini cukup memadai untuk menunjang kinerja. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1. Daftar Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Tanah	1.343.318 M ²	Sebagian belum bersertifikat
2	Bangunan	18 Unit	4 unit rusak berat, 4 unit rusak sedang, 10 unit Baik.
3	Alat Angkut	47 Unit	24 Unit baik, 23 Unit rusak berat
4	Alat Pertanian	175 Unit	68 unit rusak ringan, 50 unit rusak berat, 43 baik
5	Alat Pengolah Data	101 Unit	60 Unit baik, 30 unit rusak berat, 11 unit rusak ringan,
6	Alat Laboratorium	6 Unit	6 Unit baik
7	Alat Rumah Tangga dan Kantor	164 Unit	130 Unit baik, 30 unit rusak ringan, 2 unit rusak berat

Sumber : Data olahan Dinas Perkebunan Tahun 2025

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan (rehabilitasi) dan penambahan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Tahun 2025 telah dialokasikan dana untuk Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dinas Perkebunan, meliputi ; Bangunan, alat pertanian, alat pengolahan data, alat rumah tangga dan kantor

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2024 mencapai rasio 57,70 berdasarkan evaluasi renja 2024.

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2024 mencapai rasio 0,68 atau 68 %, dari sisi kuantitas mencapai rasio 0,71. Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2024 mencapai rasio 0,85 %.

Untuk Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya peningkatan Nilai tambah, Daya saing dan Pemasaran produk perkebunan, secara umum capaian kinerja dari sisi target anggaran sampai akhir periode 2024 mencapai rasio 2,75 %.

Terkait dengan pelaksanaan Renstra dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2021-2026, berbagai program dan kegiatan telah digelontorkan baik melalui pembiayaan APBD-Provinsi Jambi maupun dukungan dana APBN setiap tahun sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Capaian kinerja dinas Perkebunan Provinsi Jambi selama 5 tahun, secara umum dapat dikategorikan **Cukup Baik**, hal ini diindikasikan dengan **rasio Serapan Anggaran sebesar 0,83** atau dapat dikatakan penggunaan Anggaran hanya 81,89 % dan sebesar 18,11 % kegiatan yang ditetapkan didalam Renstra tidak dapat direalisasikan.

Adapun rincian dari Capaian Progran dan Kegiatan didalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

No	Indikator Kinerja Kunci	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target IKK Renstra Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Tanaman Perkebunan																		
	Produksi Karet				353.145	364.906	364.908	364.909	364.909	377.159	364.004	347.144	335.374	339.295	106,8	99,75	95,13	91,91	92,98
	Produksi Kelapa Sawit				1.830.035	1.920.324	1.950.054	2.000.004	2.030.531	1.940.151	2.202.122	2.298.301	2.466.303	2.442.402	106,02	114,67	117,86	123,31	120,28
	Produksi Kelapa				108.789	116.475	118.003	110.043	111.486	115.095	115.547	114.261	114.457	115.243	105,80	99,20	96,83	104,01	103,37
	Produksi Kopi				16.379	16.511	17.573	17.673	24.346	18.580	19.198	18.970	19.425	25.255	113,44	116,27	107,95	109,91	103,73
	Produksi Kayu Manis				30.250	30.250	31.250	46.279	46.679	30.087	30.200	30.282	30.407	32.046	99,46	99,83	96,90	65,70	68,65
	Produksi Pinang				13.732	14.165	28.380	28.480	28.580	13.991	28.480	34.070	32.107	32.388	101,89	201,06	120,05	112,74	113,32
	Produksi Kakao				826	867	908	949	991	925	937	936	723	691	111,99	108,07	103,08	76,19	69,73
2	Meningkatkan Pendapatan Petani, Buruh Tani dan Pekerja Lainnya																		
	NTP Subsektor Perkebunan				117,83	120,69	122,76	125,04	127,25	122,65	137,56	142,29	141,6	172,17	104,09	110,01	115,91	113,24	135,30

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

URAIAN	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.644.539.935	25.973.213.500	26.317.219.400	26.348.273.375	29.225.463.551	23.940.891.790	17.593.053.270	17.200.370.877	16.265.282.227	16.864.526.117	74,41	66,22	61,80	64,01	57,70		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	416.689.473	499.414.000	600.027.500	629.783.900	872.259.481	527.068.169	357.351.578	316.801.250	518.230.500	637.140.000	85,76	63,43	86,37	101,17	73,04		
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	224.357.500	280.466.000	350.582.500	350.582.500	547.785.156	267.470.750	179.486.000	165.211.750	289.180.500	303.590.000	80,00	58,91	82,49	86,60	55,42		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	17.250.000	19.837.500	19.837.500	26.235.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	23.000.000	26.450.000	26.450.000	34.980.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15.000.000	17.250.000	19.837.500	19.837.500	26.235.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	17.250.000	19.837.500	22.813.000	26.234.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	172.500.000	198.375.000	228.131.000	262.350.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Evaluasi kinerja perangkat daerah	22.331.973	23.448.000	24.620.000	24.620.400	27.143.550	259.597.419	177.865.578	151.589.500	229.050.000	333.550.000	796,46	646,49	930,34	7,38	1.228,84		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.507.639.281	17.332.500.000	18.199.125.000	18.199.125.000	20.064.535.313	16.658.503.941	15.721.978.899	15.496.776.567	13.713.997.605	14.612.944.659	95,24	89,41	75,36	80,29	72,83		
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	16.117.639.281	16.923.000.000	17.769.150.000	17.769.150.000	19.590.487.875	16.258.860.941	15.350.132.649	15.090.780.467	13.266.472.705	14.192.424.659	95,24	89,17	74,66	79,87	72,45		
Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	280.000.000	294.000.000	308.700.000	308.700.000	340.341.750	243.643.000	267.470.750	367.280.000	372.542.400	350.520.000	95,53	124,93	120,68	113,55	102,99		
Koordinasi danPelaksanaan AkuntansiSKPD	110.000.000	115.500.000	121.275.000	121.275.000	133.705.688	156.000.000	104.375.500	38.716.100	74.982.500	70.000.000	94,89	33,52	61,83	57,72	52,35		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	183.800.000	192.990.000	202.225.000	202.639.500	222.953.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	93.800.000	98.490.000	103.000.000	103.414.500	113.557.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	40.000.000	42.000.000	44.100.000	44.100.000	48.620.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penatausahaan barang milik daerah SKPD	50.000.000	52.500.000	55.125.000	55.125.000	60.775.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.224.450.000	4.435.672.500	4.657.045.000	4.657.456.125	5.134.392.113	156.750.000	103.969.200	18.000.000	168.260.950	16.500.000	2,46	0,41	3,61	0,35	0,32		
Pengadaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	98.000.000	102.900.000	108.045.000	108.045.000	119.119.613	107.250.000	76.969.200	-	119.999.950	-	78,54	-	111,06	-	-		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian	3.600.000.000	3.780.000.000	3.969.000.000	3.969.000.000	4.375.822.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	526.450.000	552.772.500	580.000.000	580.411.125	639.450.000	49.500.000	27.000.000	18.000.000	48.261.000	16.500.000	5,13	3,26	8,32	2,84	2,58		

Administrasi Umum Perangkat Daerah	871.423.350	914.981.000	960.728.400	960.730.050	1.059.203.061	1.212.527.550	438.047.073	383.699.124	639.567.546	576.308.169	50,27	41,94	66,57	59,99	54,41		
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	26.100.000	27.405.000	28.775.000	28.775.250	31.724.438	17.450.000	17.430.000	17.427.000	49.989.262	21.756.200	66,78	63,59	173,72	75,61	68,58		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	219.253.750	230.216.000	241.726.400	241.726.800	266.503.356	572.510.050	100.730.040	100.730.040	149.998.936	107.564.636	45,94	43,75	62,05	44,50	40,36		
Penyediaan peralatan rumah tangga	83.033.200	87.184.000	91.543.000	91.543.200	100.926.158	168.425.500	63.798.583	63.795.134	72.819.348	84.000.000	76,84	73,17	79,55	91,76	83,23		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.120.000	22.176.000	23.284.000	23.284.800	25.670.610	10.960.000	10.958.450	10.958.450	16.785.000	11.000.000	51,89	49,42	72,09	47,24	42,85		
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	521.916.400	548.000.000	575.400.000	575.400.000	634.378.500	443.182.000	245.130.000	190.788.500	349.975.000	351.987.333	46,97	34,82	60,82	61,17	55,49		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	432.637.581	1.421.030.000	462.881.500	463.081.500	510.326.854	1.244.442.000	102.816.000	101.356.696	175.895.900	41.426.393	23,76	7,13	38,00	8,95	8,12		
Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	-	980.000.000	-	-	-	399.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengadaan Mebel	180.607.581	189.000.000	198.450.000	198.450.000	218.791.125	769.542.000	-	76.881.852	175.895.900	41.426.393	-	40,68	88,63	20,87	18,93		
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	252.030.000	252.030.000	264.431.500	264.631.500	291.535.729	75.900.000	102.816.000	24.474.844	-	-	40,80	9,71	-	-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.000.000	509.940.000	535.437.000	535.437.000	590.319.293	530.730.000	372.990.000	343.788.480	429.777.376	421.196.896	72,85	67,42	80,27	78,66	71,35		
Penyediaan jasa surat menyurat	42.000.000	44.100.000	46.305.000	46.305.000	51.051.263	23.130.000	39.348.000	21.480.000	29.996.896	29.996.896	93,69	48,71	64,78	64,78	58,76		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	470.000.000	465.840.000	489.132.000	489.132.000	539.268.030	507.600.000	333.642.000	322.308.480	399.780.480	391.200.000	70,99	69,19	81,73	79,98	72,54		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.900.250	666.686.000	699.750.000	700.020.300	771.474.375	3.610.870.130	495.900.520	539.948.760	619.552.350	559.010.000	100,00	80,99	88,54	79,86	72,46		
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	360.060.250	255.000.000	267.750.000	267.750.000	295.194.375	372.063.880	360.060.520	452.678.760	520.023.150	460.000.000	100,00	177,52	194,22	171,80	155,83		
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	87.320.000	91.686.000	96.000.000	96.270.300	105.840.000	463.225.000	87.320.000	87.270.000	99.529.200	99.010.000	100,00	95,18	103,68	102,85	93,55		
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	48.520.000	320.000.000	336.000.000	336.000.000	370.440.000	2.775.581.250	48.520.000	-	-	-	100,00	-	-	-	-		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.574.000.000	28.268.250.000	29.350.555.000	32.645.935.000	30.622.556.488	5.167.567.198	4.380.808.146	9.826.804.388	14.082.293.686	7.197.100.490	17,13	34,76	47,98	22,05	23,50		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16.604.000.000	17.478.250.000	18.401.555.000	18.203.387.500	20.069.422.738	168.336.000	220.000.000	343.598.900	177.999.760	153.050.000	1,32	1,97	0,97	0,84	0,76		
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	277.000.000	311.050.000	340.250.000	341.207.500	411.865.625	84.168.000	110.000.000	171.799.450	177.999.760	153.050.000	39,71	55,23	52,31	44,86	37,16		
Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	150.000.000	165.000.000	173.250.000	173.250.000	191.008.125	84.168.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	71.000.000	40,00	36,36	34,63	40,98	37,17		
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	127.000.000	146.050.000	167.000.000	167.957.500	220.857.500	-	50.000.000	111.799.450	117.999.760	82.050.000	39,37	76,55	70,66	48,85	37,15		
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	15.500.000.000	16.257.500.000	17.052.000.000	16.852.875.000	18.413.955.000	4.841.097.698	4.024.608.138	9.347.005.405	13.754.293.926	6.915.855.208	25,97	57,49	80,66	41,04	37,56		
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350.000.000	350.000.000	350.000.000	150.000.000		-	-	-	461.793.500	305.080.000	-	-	131,94	203,39	#DIV/0!		
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	15.150.000.000	15.907.500.000	16.702.000.000	16.702.875.000	18.413.955.000	4.841.097.698	4.024.608.138	9.347.005.405	13.292.500.426	6.610.775.208	26,57	58,76	79,59	39,58	35,90		
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang						0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Provinsi	827.000.000	909.700.000	1.009.305.000	1.009.305.000	1.243.602.113	158.133.500	136.200.008	136.200.083	150.000.000	128.195.282	16,47	14,97	14,86	12,70	10,31		
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro organisme	157.000.000	172.700.000	198.605.000	198.605.000	262.655.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	670.000.000	737.000.000	810.700.000	810.700.000	980.947.000	158.133.500	136.200.008	136.200.083	150.000.000	128.195.282	20,33	18,48	18,50	15,81	13,07		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.395.000.000	2.530.000.000	2.705.000.000	2.705.000.000	2.957.500.000	12.846.328.360	7.447.739.382	3.017.663.923	12.197.776.858	632.091.900	310,97	119,28	450,93	8,59	21,37		
Penataan Prasarana Pertanian	2.395.000.000	2.530.000.000	2.705.000.000	2.705.000.000	2.957.500.000	12.846.328.360	7.447.739.382	3.017.663.923	12.197.776.858	632.091.900	310,97	119,28	450,93	8,59	21,37		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	200.000.000	300.000.000	200.000.000	350.000.000	300.000.000	287.815.200	50.000.000	50.000.000	150.000.000	82.091.900	25,00	16,67	75,00	23,45	27,36		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	415.000.000	415.000.000	415.000.000	-	-	763.584.000	-	-	787.000.000	-	-	-	189,64	-	-		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1.150.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.730.000.000	1.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	100.000.000	115.000.000	115.000.000	150.000.000	157.500.000	9.432.400.000	6.705.954.850	-	-	-	6.705	-	-	-	-		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	80.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	230.000.000	237.066.160	76.177.440	-	-	-	95,22	-	-	-	-		
Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	250.000.000	-	200.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	200.000.000	250.000.000	200.000.000	312.500.000	312.500.000	2.125.463.000	615.607.092	2.967.663.923	6.641.091.858	550.000.000	307,80	1.187	3.320,55	176,00	176,00		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	-	-	125.000.000	4.619.685.000	157.500.000			0	4.619.685.000	-	-	-	100,00	-	-		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.450.000.000	2.560.000.000	2.719.000.000	2.766.500.000	2.945.633.750	805.205.200	506.609.693	4.187.057.246	10.225.139.933	4.476.291.920	20,68	163,56	376,06	161,80	151,96		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.450.000.000	2.560.000.000	2.719.000.000	2.766.500.000	2.945.633.750	805.205.200	506.609.693	4.187.057.246	10.225.139.933	4.476.291.920	20,68	163,56	376,06	161,80	151,96		
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200.000.000	210.000.000	241.500.000	241.500.000	319.383.750	474.666.000	257.194.679	400.000.000	482.000.000	393.166.920	128,60	190,48	199,59	162,80	123,10		

Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.450.000.000	1.500.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	1.600.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	4,84	4,69		
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan	500.000.000	500.000.000	525.000.000	525.000.000	551.250.000	330.539.200	249.415.014	3.787.057.246	9.743.139.933	4.008.125.000	49,88	757,41	1.855,84	763,45	727,10		
Penanggulangan Pasca Bencana Alam bidang Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300.000.000	350.000.000	402.500.000	450.000.000	475.000.000	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	325.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	300.000.000	417.462.500	50.000.000	600.000.000	625.000.000	8.232.537.460	15,38	240,00	227,27	2.994	2.744,18		
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	300.000.000	-	-	-	625.000.000	8.232.537.460	-	-	227,27	2.994	2.744,18		
Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	100.000.000	-	75.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	125.000.000	175.000.000	175.000.000	-	-	-	-	6.232.537.460	-	-	-	3.561	3.561,45		
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	75.000.000	100.000.000	75.000.000	100.000.000	125.000.000	417.462.500	50.000.000	600.000.000	625.000.000	2.000.000.000	66,67	600,00	833,33	2.000	1.600,00		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.800.000.000	5.450.000.000	5.250.000.000	4.038.862.500	4.350.000.000	823.794.265	470.428.890	1.381.101.522	5.795.435.000	2.903.000.000	12,38	25,34	110,39	71,88	66,74		
Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	500.000.000	900.000.000	800.000.000	550.000.000	600.000.000	-	-	-	75.000.000	-	-	-	9,38	-	-		
Pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	250.000.000	450.000.000	400.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyulu Pertanian	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	250.000.000	450.000.000	400.000.000	250.000.000	300.000.000	-	-	-	75.000.000	-	-	-	18,75	-	-		
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.250.000.000	1.650.000.000	1.600.000.000	1.250.000.000	1.350.000.000	-	443.034.890	1.381.101.522	1.178.000.000	903.000.000	35,44	83,70	73,63	72,24	66,89		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	300.000.000	400.000.000	350.000.000	300.000.000	300.000.000	0	443.034.890	979.905.000	1.178.000.000	75.000.000	147,68	244,98	336,57	25,00	25,00		
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	950.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	950.000.000	1.050.000.000	-	-	401.196.522	-	828.000.000	-	32,10	-	87,16	78,86		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.050.000.000	2.900.000.000	2.850.000.000	2.238.862.500	2.400.000.000	823.794.265,00	27.394.000,00	-	4.542.435.000	2.000.000.000	1,34	-	159,38	89,33	83,33		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	1.500.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	1.500.000.000	1.650.000.000	823.794.265	27.394.000,00	-	4.542.435.000	1.500.000.000	1,83	-	211,28	100,00	90,91		
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	550.000.000	750.000.000	700.000.000	738.862.500	750.000.000	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	67,67	66,67		
Jumlah	49.218.539.935	54.241.463.500	55.667.774.400	63.033.070.875	59.848.020.039	44.001.249.313	30.448.639.381	36.212.997.956	59.190.927.704	40.305.547.887	61,86	66,76	106,33	63,94	67,35		

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik internal maupun eksternal.

Komponen yang paling berpengaruh dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup kualitas sumberdaya manusia, kemampuan anggaran dan kebijakan Pemerintah. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah tuntutan masyarakat dan globalisasi pasar dunia yang berkembang. Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Dinas Perkebunan selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1. Capaian penting Renstra periode 2020-2024

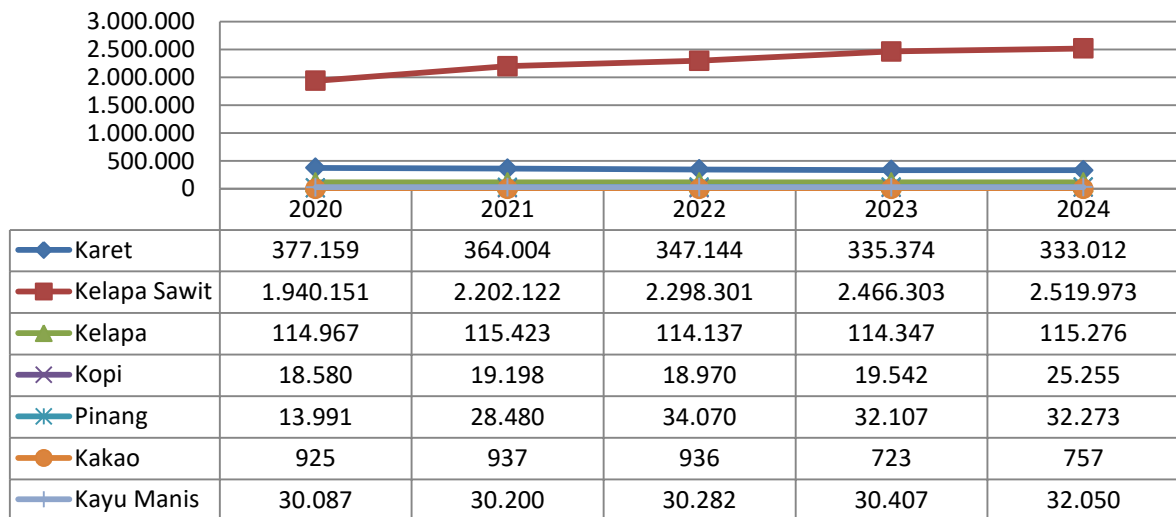
Hasil review capaian renstra 2020-2024 dimana terdapat perubahan target dan indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi khususnya komoditi Perkebunan yang diselaraskan juga dengan Program Nasional. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dinas Perkebunan tahun 2020-2024 yakni :

2. Komoditi Perkebunan

Indikator kinerja komoditi perkebunan adalah produksi dimana untuk komoditi kelapa sawit, karet , kelapa, dan kakao rata-rata Capaian kinerja mencapai lebih kurang dari 91,50 – 97,12 persen, kecuali untuk komoditi Kakao hanya mencapai rata-rata 14,86 persen , sedangkan komoditi kopi dan pinang mencapai rata-rata 106,57- 134,22 persen melebihi target yang ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi pada :

- Komoditi perkebunan antara lain, petani pekebun belum sepenuhnya menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) secara konsisten, petani pekebun masih ada menggunakan bibit palsu (bibit ilegal/tidak bersertifikat dan tidak bermutu), perubahan harga jual komoditi perkebunan yang mempengaruhi motivasi petani dalam melaksanakan intensitas perawatan kebun dan panen, bertambahnya luasan tanaman tidak menghasilkan/rusak dan tidak produktif, aspek kelembagaan petani dan penyuluh pertanian yang belum berfungsi dengan baik dan optimal dalam pemberdayaan petani serta perubahan iklim yang berpengaruh terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kebakaran lahan perkebunan.
- Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi kelapa adalah tanaman tidak dipanen oleh petani disebabkan harga jual yang rendah. Petani merasa rugi karena ongkos panen lebih tinggi dari harga jual. Selain itu juga petani kelapa belum menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) karena keterbatasan modal dan SDM, tanaman kelapa banyak yang sudah tua dan rusak yang sangat berpengaruh pada jumlah produksi dan produktivitas.
- Sedangkan permasalahan pada tanaman karet adalah petani karet belum menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) karena keterbatasan modal dan SDM, tanaman sudah banyak yang tua dan rusak akibat kurangnya perawatan, terdapat harga jual hasil olahan karet yang rendah menyebabkan petani karet tidak melakukan intensitas perawatan dan panen serta petani karet melakukan alih komoditi lain.
- Permasalahan pada tanaman kakao dikarenakan belum adanya bibit yang bersertifikat / bibit unggul seperti tanaman kelapa sawit / karet yang mempunyai produktivitas tinggi sehingga petani menanam tanaman kakao dari hasil anakan tanaman kakao disekitar kebun, selain itu perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan perilaku OPT pada tanaman kakao. Kemudian, terdapat kondisi tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, kurangnya intensitas pemeliharaan kebun, serangan OPT dan belum diimplementasikannya Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten.

Grafik Rasio Pencapaian Produksi Perkebunan Selama Periode 2020-2024



3. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Sub Sektor Perkebunan

Lapangan Usaha	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)				
	2020	2021	2022	2023	2024
NTUP	137,56	148,87	148,10	146,16	170,76

Usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditi tanaman perkebunan dilakukan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, alat pasca panen maupun promosi serta mutu hasil produk yang dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang terdaftar di Provinsi Jambi masih berjalan secara maksimal.,NTUP Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2021 sebesar 148,87 % menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pekebun tercapai karena harga yang diterima petani pekebun lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh petani pekebun untuk biaya produksi usahatannya. Kenaikan NTUP ini didukung oleh peningkatan komoditi ekspor komoditi perkebunan yaitu kelapa sawit, kopi, kayu manis dan pinang. Sedangkan pada tahun 2020-2024 nilai NTUP sub sektor perkebunan mengalami peningkatan sebesar 1,40 %, yakni tercatat sebesar 146,16 pada tahun 2023, dan sebesar 170,76 pada tahun 2024..Untuk mempertahankan kondisi NTUP sub sektor perkebunan ini perlu ditetapkan program dan kegiatan komoditi perkebunan yang berorientasi ekspor yang dimulai dari program kegiatan di sektor hulu, kelembagaan dan sektor hilirisasi. Sehingga diharapkan visi misi Gubernur Jambi periode 2025-2029 dapat tercapai.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam mendukung Pertumbuhan PDRB Pada Lapangan Usaha Subsektor perkebunan serta Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan maka kelompok sasaran layanan dan pengembangan kawasan perkebunan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman perkebunan di 10 Kabupaten/kota
- 2) Peremajaan tanaman perkebunan di 10 Kabupaten/kota
- 3) Peningkatan kualitas mutu benih tanaman perkebunan
- 4) Ketersediaan benih unggul dan bersertifikat
- 5) Intensifikasi tanaman perkebunan di 10 Kabupaten/kota
- 6) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan di 10 Kabupaten/kota
- 7) Luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT
- 8) Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan
- 9) Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun
- 10) Promosi komoditas dan produk perkebunan
- 11) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
- 12) Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa

Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa

Potensi pengembangan kawasan perkebunan mengacu pada luas 7 (tujuh) komoditi perkebunan di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel. Luas Perkebunan 7 (tujuh) komoditi unggulan di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020 - 2024;

No	Komoditi	Luas (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karet	672.577	666.207	622.202	611.754	606.228
2	Kelapa Sawit	1.027.477	1.099.191	1.097.689	1.126.358	1.131.327
3	Kelapa Dalam	119.334	119.332	115.290	115.116	114.777
4	Kopi	30.103	30.855	30.986	30.848	31.793
5	Pinang	22.128	22.387	25.594	25.308	25.312
6	Kakao	2.745	2.728	2.629	2.173	1.932
7	Kayu Manis	45.889	46.210	46.343	46.255	46.555
Jumlah		1.920.253	1.986.910	1.940.733	1.957.812	1.957.924

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Luas lahan terhadap tujuh komoditi unggulan perkebunan provinsi jambi setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga 2024 di komoditi sawit mengalami peningkatan luas lahan setiap tahun nya, peningkatan dipengaruhi minat petani yang semakin tinggi dan harga jual kelapa sawit yang terus meningkat. Luas lahan kelapa sawit setiap tahunnya bertambah sekitar 1,04%. Berbeda dengan komoditi karet mengalami penurunan luasan dari tahun 2020 hingga 2024, penurunan ini disebabkan oleh menurunnya minat petani karet dikarenakan harga jual yang menurun dan gangguan OPT yang merugikan petani. Pengurangan luas lahan karet secara langsung mempengaruhi pertambahan luasan kelapa sawit dikarenakan alihfungsi lahan karet ke kelapa sawit.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perkebunan maka indikator program yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi tanaman unggulan (kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, pinang, kakao, dan kayu manis)
2. Meningkatnya produktivitas tanaman unggulan (kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, pinang, kakao, dan kayu manis)
3. Meningkatkan benih/bibit unggul yang berkualitas
4. Terciptanya pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan oleh pelaku utama maupun pelaku usaha perkebunan.
5. Meningkatnya posisi tawar petani melalui pengembangan kawasan tanaman perkebunan berbasis korporasi petani
6. Meningkatnya peran kelembagaan petani dalam mendukung penerapan Good Agriculture Practices (GAP) secara konsisten oleh petani pekebun
7. Terciptanya industri hilirisasi yang mengarah kepada konsep korporasi petani
8. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (aparatur, penyuluh dan petani pekebun)

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni :

a. Luas tanaman tua dan rusak (TTM/TR) semakin bertambah

Dari luas perkebunan terdapat luas komoditas tanaman perkebunan tanaman tua dan rusak (TTM/TR) dari total luas perkebunan di Provinsi Jambi sebagaimana disajikan pada Tabel

Tabel Luas Tanaman Tidak Menghasilkan dan Rusak (TTM/TR) Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.

No	Komoditi	Luas (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karet	101.312	101.174	93.906	94.584	92.497
2	Kelapa Sawit	153.479	137.902	139.116	128.847	128.859
3	Kelapa	17.873	17.621	15.909	16.087	16.135
4	Kopi	2.622	2.678	2.904	2.885	3.821
5	Pinang	835	870	802	823	819
6	Kakao	385	381	422	361	354
7	Kayu Manis	740	751	566	200	200
Jumlah		277.246	261.377	253.625	243.787	242.685

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020 - 2024;

Berdasarkan tabel.13. diatas bahwa Luas tanaman tua dan rusak (TTM/TR) komoditi perkebunan mengalami penurunan pada tahun 2020 ke tahun 2024 seluas 15.581 Ha. Penurunan luas TTM/TR ini sejalan dengan bertambahnya usia tanaman dari kebun eks plasma perusahaan kelapa sawit, adanya konflik perusahaan yang menyebabkan terlantarnya dan faktor iklim sehingga banyak ditumbangkan dan alih fungsi lahan. Hal ini dengan sendirinya mempengaruhi pendapatan yang diperoleh pekebun.

b. Masih rendahnya capaian produksi dan produktivitas tanaman perkebunan rakyat

Produksi perkebunan di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel.14 dibawah ini, secara angka statistik mengalami peningkatan, namun bila dilihat dari sisi produktivitas masing- masing komoditi perkebunan tersebut masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan angka Potensi Baku Teknis Nasional, kecuali untuk komoditi Pinang dan Kayu Manis produktivitasnya tercapai optimal diatas Potensi Baku Teknis Nasional, sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Produksi 7 komoditi unggulan Perkebunan di Provinsi Jambi 2020-2024

No.	Komoditi	Produksi (Ton)					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Karet	377.159	364.004	347.144	335.374	334.568	Slab
2	Kelapa Sawit	1.940.151	2.202.122	2.298.301	2.466.303	2.519.973	CPO
3	Kelapa	114.967	115.423	114.137	114.347	115.276	Kopra
4	Kopi	18.580	19.198	18.970	19.542	25.255	Biji Kering
5	Pinang	13.991	28.480	34.070	32.107	32.273	Biji kering
6	Kakao	925	937	936	723	757	Biji kering
7	Kayu Manis	30.087	30.200	30.282	30.407	32.050	Kulit/ Stick
Jumlah		2.495.860	2.760.364	2.843.840	2.998.803	3.058.596	

Sumber : Statistik Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2020 - 2024

c. Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Pada beberapa daerah hilir mengalami kerusakan tanggul, saluran dan pintu klep (trio tata air), sehingga menyebabkan intrusi air laut. Masuknya air laut menyebabkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah rusak, dan menyebabkan pertanian dan perkebunan rusak, tidak dapat tumbuh dengan baik. Beberapa daerah pesisir selain mengalami intrusi air laut juga abrasi, yaitu kehilangan wilayah daratan akibat tergerus ombak air laut. Kondisi jalan produksi di perkebunan dengan tanah mineral juga belum memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

d. Penerapan teknologi pertanian masih rendah

Penerapan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, teknologi pola dan jarak tanam, pengendalian Hama penyakit serta pemupukan juga masih tergolong rendah.

e. Ketersediaan dan pemanfaatan lahan

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menimbulkan terjadinya Kompetisi pemanfaatan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektoral yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan.

f. Industri hilir sub sektor perkebunan dan pemasarannya masih terbatas

Selain produk Kelapa sawit dan Karet yang telah diusahakan oleh industri perkebunan besar, kondisi industri hilir dari komoditas Kelapa, kakao, kopi, dan pinang serta Kulit Kayu Manis masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga.

Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas perkebunan menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas. Peluang pengembangan industri hilirisasi terutama untuk komoditi kelapa sawit berupa Pabrik Kelapa Sawit Mini (PKS Mini), Pabrik Industri Vegetable Oil (IVO) yang dapat menghasilkan minyak nabati / biofuel pengganti minyak non nabati, pabrik pengolahan kopi siap konsumsi, pabrik pengolahan pinang. Peluang tersebut didukung dengan bahan baku di sektor hulu yang cukup tersedia untuk pembangunan pabrik dan dikelola sendisi oleh petani pekebun dengan konsep korporasi petani.

Industri Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) saat ini berjumlah 95 unit 80 Perusahaan dan pabrik pengolahan karet berjumlah 9 unit. Potensi pengolahan produk dari pohon kelapa yang bisa dilaksanakan oleh petani skala rumah tangga dengan membentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu dari air kelapa (28%) adalah dibuat nata de coco, kecap, cuka dan minuman. Dari tempurung (16%) dibuat arang batok, tepung arang, arang aktif, dan barang kerajinan alat rumah tangga berupa gayung dan sendok sayur. Dari sabut kelapa (20%) dapat dibuat keset, karpet, tali dan matras, sedangkan dari lidi (5%) dibuat sapu lidi, aneka keranjang dan piring. Hal ini berlaku juga untuk produk turunan karet, kakao, kopi, pinang dan kulit kayu manis.

Jumlah PKS di Provinsi Jambi sampai dengan 2024 tercatat 95 unit dengan total Kapasitas sebesar 3.447 dan Kapasitas terpasang sebesar 3.342 ton TBS/Jam, sedangkan Kapasitas terpakai sebesar 4.857 ton TBS/Jam. 95 unit PKS tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni PKS Kebun sebanyak 70 unit dengan Kapasitas 1.872 ton TBS/Jam, dan sebanyak 25 unit PKS Non Kebun dengan Kapasitas 1.575 ton TBS/Jam.

g. Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Sampai saat ini SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja professional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh

dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaann tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang. Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum megacu kepada aspek *“the right man in the right place”* terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

h. Kapabilitas petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, oleh karena itu kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan capaian hasil pembangunan. Petani perkebunan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu- ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian $\pm$ 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan dari pada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

i. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan. Sampai saat ini petani masih kesulitan untuk bisa mengakses dan menggunakan pinjaman perbankan untuk biaya produksi usahatani, meskipun pemerintah melalui pihak perbankan sudah banyak mengeluarkan skema kredit. Kendala tersebut antara lain bunga pinjaman yang masih tinggi bagi petani pekebun terutama dengan grace periodlain itu juga disebabkan terbatasnya informasi, kemampuan manajerial

dan pengetahuan petani, keengganan petani berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sehingga mereka tidak mampu memenuhinya.

j. Budaya atau kebiasaan masyarakat / petani

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan di tingkat masyarakat/petani belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat. Budaya/kebiasaan ini mulai dari pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen pasca panen. Mengubah kebiasaan turun menurun ini dapat diubah melalui pendampingan petani secara kontinyu oleh petugas kabupaten maupun petugas penyuluh.

L. Laju Pertumbuhan penduduk relatif tinggi

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi termasuk pada kategori yang tinggi, dimana rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama 5 tahun (2020-2024) adalah sebesar 4,96 %. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Jambi tercatat 3.724.312 jiwa, bila dibandingkan pada tahun 2022 tercatat 3.631.122 jiwa, selama kurun waktu 3 tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebesar 82.907 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini bukan saja disebabkan oleh angka kelahiran, tetapi lebih disebabkan karena migrasi penduduk dari luar Provinsi Jambi yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi di Provinsi Jambi.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Jambi. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah: a) masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; b) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan; c) belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya; d) belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya; Masalah kapasitas sumberdaya manusia (SDM), sarana perkantoran dan kelembagaan dinas (Disbun) merupakan masalah yang umum di daerah yang baru, baik di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten.

Persoalan ini berimplikasi pada kinerja Disbun secara keseluruhan. Ini merupakan masalah mendasar yang perlu segera ditangani. Selain permasalahan internal dalam lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jambi di atas, juga dirasakan Kebijakan Pemprov-Pemkab yang tidak sinkron, kurang terkoordinasi dan kapasitas yang rendah. Masing-masing menilai sering terjadi ketidak-sinkronan program dan kegiatan antara mereka, bahkan sering tidak terkoordinir, karena satu dan lain penyebab. Juga terungkap bahwa, kapasitas Disbun Provinsi dan Kabupaten tidak mencukupi atau tidak sepadan dengan permasalahan yang dihadapi yang begitu besar dan dinamis. Ini tentu mengganggu kinerja Disbun Provinsi dan Kabupaten serta

merugikan masyarakat.

Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Jambi belum memiliki peta permasalahan di sektor perkebunan yang dipetakan secara spasial, kuantitatif dan sesuai dengan urgensinya.

Permasalahan yang teridentifikasi hanya bersifat kuantitatif dan tidak terpetakan. Misalnya, sulit untuk mendapatkan data spasial dan akurat terkait kebutuhan peremajaan masing-masing komoditas perkebunan. Demikian juga dengan data-data lain, seperti yang terkait dengan praktik pemupukan dan kebutuhan pupuk, hama dan penyakit tanaman, penurunan produktifitas dan mutu produk, pemasaran hasil, kelembagaan, kebutuhan infrastruktur dan berbagai hal lain. Karena permasalahan belum terpetakan dengan baik, sulit untuk membuat perencanaan pembangunan sektor perkebunan yang tepat, sesuai kebutuhan berdimensi spasial dan waktu serta terintegrasi dengan sektor sektor lain. Walaupun belum berbasis spasial, identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan perkebunan dan mencapai tujuan dan sasaran dinas serta berkontribusi pada pencapaian target RPD telah dilakukan. Hasil identifikasinya sebagai berikut:

NO	POTENSI DAERAH MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Rendahnya Produksi dan produktivitas perkebunan	Banyaknya serangan OPT dan dampak perubahan iklim	Populasi tanaman tidak produktif, tua, rusak berat semakin bertambah di wilayah Provinsi Jambi	Terbatasnya kapasitas sumber daya (SDM, sumber benih dan anggaran) untuk melaksanakan, rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi tanaman	Kondisi alam, kurang fokusnya petani mengelola, dan regulasi perbenihan	Peningkatan SDM petani dalam penanggulangan bencana akibat OPT dan dampak perubahan iklim serta kemahiran dalam penanggulangan secara preventif dan responsive Perbaikan kondisi lahan karet yang rusak diakibatkan serangan OPT yang telah tersebar ke seluruh wilayah provinsi jambi
				Prasarana dan sarana produksi belum memadai	Terbatasnya alokasi penganggaran penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung sub sektor perkebunan (fokus ke tanaman pangan)	Minimnya investasi stakeholder/pelaku usaha perkebunan dalam penyediaan sarana dan prasarana perkebunan	
				Ketersediaan/ sertifikasi benih unggul di wilayah provinsi jambi belum memadai.	Terbatasnya penangkar benih		
				Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	Tingginya variasi serangan OPT		
				Petani pekebun kurang produktif	Regenerasi petani perkebunan		

NO	POTENSI DAERAH MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2		Penurunan nilai tambah komoditi perkebunan unggulan	Rendahnya harga jual komoditi perkebunan	Penerapan teknologi inovasi perkebunan	Kurangnya Informasi Teknologi Pengembangan Komoditi Perkebunan		Peningkatan pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil panen pada kelompok tani perkebunan diantaranya : 1. Peningkatan kualitas kopi jambi dengan menambah kulaitas pengolahan kopi sehingga meingkatkan citaras dan branding kopi jambi yang kuat. 2. Pengolahan kelapa sawit secara mandiri pada gapoktan 3. Pengolahan produk jadi kayu manis siap ekspor
					Integrasi Komoditi Perkebunan dengan Komoditi Lain	Pelatihan / Peningkatan Keterampilan Kelompok Tani	
				Sarana pengolahan hasil perkebunan	Terbatasnya Unit Pengolahan Hasil		
				Kurangnya penanganan pasca panen komoditi perkebunan	Terbatasnya Unit Penanganan Pasca Panen komoditi Perkebunan		
3		Penurunan daya saing hasil komoditi perkebunan unggulan	Kurangnya kualitas produk yang dihasilkan	Penerapan regulasi/legalitas usaha perkebunan	Kurangnya Pemahaman Pelaku Perkebunan terhadap aturan yang ada	Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundangan yang Ada	Peningkatan SDM petani yang berkualitas dalam pertanian hulu hingga hilir dengan bantuan-bantuan sarana prasarana
						Terbatasnya Perizinan Pelaku Usaha Perkebunan	Penertiban sertifikat yang diakui dan menunjukkan kualitas

			Rendahnya penerapan standarisasi mutu global (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices, Good Manufacture Practices) komoditi unggulan perkebunan	Kurangnya Penerapan SNI Komoditi Perkebunan Permentasi Kelapa sawit, ISPO	Sertifikat yang berskala Global	produk yang dibutuhkan oleh pembeli produk hasil perkebunan
				Kurangnya Penerapan Pembinaan Penerapan Standart Mutu		
			Akses pemasaran hasil komoditi perkebunan	Akses Kemitraan dengan Pelaku Usaha Perkebunan	Penetapan Harga Komoditi Perkebunan	

a. Penurunan Produksi dan Produktifitas Komoditi Unggulan Daerah

Penurunan produksi dan produktivitas di Provinsi Jambi dari tujuh komoditi yang sangat menurun adalah komoditi karet, dalam upaya peningkatan dan stabilitas produksinya telah memperoleh berbagai dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Walaupun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produktivitas tanaman karet dalam provinsi belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Konversi lahan dan penurunan produktivitas tanaman yang telah tua serta tingginya tingkat serangan jamur akar putih kemungkinan menjadi salah satu faktor penyebab penurunan produktivitas ini. Penurunan produktivitas dan mutu merupakan isu umum yang ditemukan di seluruh kabupaten di Provinsi Jambi, terutama untuk komoditas karet (komoditas yang merupakan unggulan kedua di Provinsi Jambi), penurunan produksi pinang dan kakao yang disebabkan minat pekebun yang telah beralih ke komoditi lainnya yang mempengaruhi kualitas produksi sehingga menurunkan harga jula produk pinang dan kakao.

b. Nilai Tambah dalam Proses Produksi hingga Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Semua tanaman perkebunan, termasuk kebun plasma sawit, tidak diusahakan dengan optimalisasi nilai tambah. Selama puluhan tahun, semua komoditas perkebunan, termasuk karet, kelapa, pinang, kayu manis dan kopi (keenamnya merupakan tanaman perkebunan tertua di Provinsi Jambi), hanya diusahakan tanpa usaha untuk mendapatkan nilai tambah, baik selama proses produksi di on farm (kebun) maupun di pasca panen, pemasaran dan pengolahan (processing). Ini artinya, petani tidak memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari usahatani dan bisnis perkebunan mereka. Petani sejak dulu hanya mengandalkan penjualan bahan baku asalan dari hasil panen mereka.

Nilai tambah dapat diperoleh, misalnya melalui integrasi tanaman perkebunan dengan ternak, penghematan (optimalisasi dan efisiensi) penggunaan SAPRODI, penanganan pasca panen, sistem penjualan dan pengolahan hasil.

Dalam banyak hal, petani sendiri tidak banyak bisa berbuat untuk mendapatkan nilai tambah ini, karena (misalnya) keterbatasan pengetahuan, modal dan akses pasar yang tepat bila produk yang dihasilkan telah mendapatkan nilai tambah, Aspek ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dan terprogram oleh Disbun dan SKPD lain yang terkait.

c. Sistem Pemasaran Komoditas Perkebunan belum Kompetitif

Hampir semua komoditas perkebunan rakyat di Provinsi Jambi sebagian besar masih dipasarkan secara individual (sangat jarang dipasarkan secara berkelompok). Bahkan, banyak petani yang terikat pada tengkulak. Di kebanyakan tempat, tidak ada kemitraan berbasis bisnis yang kompetitif antara kelompok tani atau koperasi. Kemitraan hanya ada di lokasi-lokasi tertentu, itupun belum lama berkembang. Informasi pasar bagi petani juga masih lemah. Ini diperparah oleh masalah infrastruktur (aksesibilitas). Padahal, sesungguhnya posisi tawar petani kelompok tani dan peluang untuk memperbaiki masalah ini begitu besar, karena produk-produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang besar di pasar global. Ini merupakan tantangan besar bagi Disbun, Disperindag, Diskop dan BUMD. Keberhasilan mengatasi persoalan ini bisa memberikan keuntungan yang besar bagi petani mendorong pembelajaran bisnis bagi petani.

2.2.2 Isu Strategis

1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Produktivitas beberapa komoditas unggulan perkebunan masih di bawah potensi optimal dikarenakan tanaman yang sudah tua dan rusak, penggunaan benih/bibit yang belum unggul, serangan hama/penyakit, teknologi budidaya yang belum mutakhir dan lain-lain.
2. Masih adanya sebagian harga komoditi perkebunan di Provinsi Jambi belum stabil dan masih rendah seperti komoditi karet dan pinang harga jual karet di tingkat petani masih dikisaran (Rp.9.300 – 11.200/Kg dan harga jual pinang Rp.6.000-7.000/Kg),
3. Kurangnya nilai tambah komoditi unggulan perkebunan yang disebabkan belum optimalnya olah pasca panen perkebunan

4. Terbatasnya hilirisasi dan nilai tambah

Sebagian besar hasil perkebunan masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Dan agroindustri belum berkembang secara signifikan.

5. Maraknya alih fungsi lahan karet dan lahan perkebunan menjadi lahan kelapa sawit, hal ini disebabkan jaminan harga jual dimana harga tandan buah sawit lebih menjamin untuk meningkatkan Pendapatan petani/pekebun, bila dibandingkan dengan karet dan pinang. sebagai gambaran 1 ha sawit mampu memberi pendapatan petani Rp.3.000.000,- sedangkan 1 ha karet hanya memberi pendapatan petani Rp.1.000.000,-

6. Adanya Undang-Undang Uni Eropa tentang Free Product Deferostige, dimana Produk Perkebunan seperti Kopi, Kelapa sawit, Kakao dan Karet bebas berasal dari kawasan hutan. Terbitnya Undang-Undang tersebut akan mempengaruhi Harga komoditi Perkebunan.

a. Strategis yang ditempuh :

- Peningkatan kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan melalui pemberian pupuk dan obat-obatan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan dan peremajaan tanaman yang sudah tua rusak serta penggunaan benih/bibit yang berkualitas dan bersertifikasi. Untuk mengantisipasi rendahnya harga karet dan harga pinang di Provinsi Jambi serta maraknya alih fungsi lahan, maka perlu dilakukan upaya berikut ;
- Peningkatan nilai tambah pada pemantapan hilirisasi karet melalui penguatan kelembagaan UPPB (unit pengelola dan pengolahan bokar bersih), dan meningkatkan minat investor untuk membangun pabrik pengolahan karet dari bahan baku menjadi bahan jadi (ban kendaraan untuk konsumen lokal)
- Peningkatan nilai tambah pada pemantapan hilirisasi pinang melalui penguatan kelembagaan UPH (unit pengolahan hasil), dan meningkatkan minat investor untuk membangun pabrik pengolahan buah piang dari bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi.

- Mendorong pembentukan industri pengolahan di tingkat kawasan agar nilai tambah produk dapat dinikmati langsung oleh petani pekebun.
- Penguatan sistem pengendalian OPT dan pencegahan penyakit secara rutin pemetaan serangan hama dan penyakit, pelatihan teknis penyuluh, program sanitasi lahan, dan kolaborasi riset untuk mitigasi hama dan penyakit.
- Perlu dilakukan penertiban terhadap produk perkebunan agar dapat terbebas dari produk yang berasal dari Kawasan hutan, melalui upaya penerbitan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) bagi kebun masyarakat/petani pekebun.
- Peningkatan Rintisan Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) baik untuk Perusahaan maupun masyarakat/petani kecil (ISPO Swadaya), sehingga kualitas produk yang dihasilkan dapat menjamin kelestarian Lingkungan melalui penerapan Prinsip-prinsip dan kriteria pembangunan kebun sawit berkelanjutan.

b. Potensi Dinas Perkebunan Mendukung Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan perkebunan secara nasional selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Indikator ekonomi makro seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Neraca Perdagangan, dan Penyerapan Tenaga Kerja Rakyat menunjukkan trend positif. Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka arahan pengembangan tanaman perkebunan untuk pembangunan tahun ke depan lebih difokuskan pada optimalisasi penggunaan benih dan bibit unggul berkualitas, intensifikasi dan diversifikasi, peremajaan tanaman, penggunaan lahan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) pekebun serta upaya mendukung Stabilitasnya perekonomian daerah.

PDRB SEKTOR PERTANIAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI PROVINSI JAMBI TAHUN (JUTA RUPIAH) 2020 - 2024

LAPANGAN USAHA	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	63.816.977,0	73.769.563,8	83.574.856,6	93.493.242,7	109.582.142,0
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	55.673.628,4	65.304.510,5	74.520.830,2	83.422.450,6	99.283.304,0
a. Tanaman Pangan	4.521.915,7	3.911.423,2	3.757.756,7	3.935.301,2	4.039.350,0
b. Tanaman Hortikultura	7.502.642,4	7.838.386,4	8.646.034,0	9.161.593,9	9.520.002,0
c. Tanaman Perkebunan	40.184.990,6	49.866.294,6	57.969.741,9	65.866.571,0	80.886.374,0
d. Peternakan	2.888.900,5	3.014.294,2	3.425.335,7	3.662.919,4	3.895.111,0
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	575.179,2	674.112,1	721.961,9	796.065,1	942.466,0
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.911.115,7	2.703.380,9	2.916.026,8	3.329.047,4	3.306.432,0
3. Perikanan	5.232.232,9	5.761.672,4	6.137.999,7	6.741.744,8	6.992.406,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	206.846.285,6	206.846.285,6	276.316.369,2	293.729.311,4	293.729.311,4
PDRB SEKTOR PERKEBUNAN	40.184.990,6	49.866.294,6	57.969.741,9	65.866.571,0	80.886.374,0
KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PDRB PROVINSI JAMBI	17,0	24,1	21,0	22,4	27,5
KONTRIBUSI PERKEBUNAN TERHADAP PDRB PERTANIAN	61,72	67,60	69,36	70,45	73,81

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif

4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam.
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS, tidak semuanya dapat dikerjakan dan hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pencapaian peningkatan luas tanam, luas panen, jumlah produksi dan produktifitas tanaman perkebunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Dinas Perkebunan berbagai tantangan dan peluang sebagai berikut :

➤ **Tantangan**

- Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi teknis.
- SDM pelaku usaha perkebunan dan Kelembagaan masih rendah
- Akses petani terhadap permodalan dan Sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas.
- Isu lingkungan hidup (kesuburan tanah), globalisasi dan

anomaly iklim serta penerapan teknologi masih terbatas.

➤ **Peluang**

- Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan
- Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Grati eks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim.
- Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis) serta Lahan yang Potensial.
- Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan.

Tinjauan Kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025-2029

Pada rancangan awal teknokratik RPJMN 2025-2029 bidang perkebunan, secara implisit memuat visi Direktorat Jenderal Perkebunan 2025-2029 yaitu: “Perkebunan Indonesia yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan dengan berfokus pada peningkatan produktivitas, hilirisasi industri, dan pengembangan pangan lokal”. Hal tersebut pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi tiga kata kondisi utama, yaitu berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut kemudian diterjemahkan kedalam Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025-2029, yaitu: 1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk perkebunan yang berkelanjutan 2. Memperkuat hilirisasi industri berbasis sumber daya perkebunan 3. Mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pangan lokal. Misi diatas menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan masih fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri dengan dukungan pengembangan pangan lokal. Kebijakan pembangunan perkebunan nasional yang terdapat pada rancangan awal teknokratik RPJMN 2025-2029 bidang perkebunan, menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024-2029. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian yang selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi RPJMN tahun 2025-2029. Dari 17 Agenda Pembangunan pada RPJMN 2025-2029, pembangunan perkebunan mengampu indeks kunci (IE 4) yaitu IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui Peningkatan nilai tambah, modernisasi pertanian, berkelanjutan (termasuk organik) dan IE 16 yaitu Ketahanan Energi, Air, dan kemandirian Pangan melalui ketersediaan, konsumsi, dan tata kelola pangan.

Strategi dalam pembangunan perkebunan dilakukan melalui 2 (dua) program prioritas, yaitu (1) Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi

Inovasi, serta Berorientasi Ekspor, dan (2) Peningkatan Produktivitas Sektor Petanian. Adapun arah kebijakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, adalah melalui implementasi beberapa kegiatan, diantaranya:

Kegiatan 1: Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati

Proses pengembangan nilai tambah dari produk-produk yang berasal dari makhluk hidup (seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) melalui pengolahan, pengembangan teknologi, dan inovasi, agar menghasilkan produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Intinya adalah mengolah hasil perkebunan menjadi produk jadi/olahan yang lebih bernilai dan kompetitif, dengan komoditi utama Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, kopi dan Karet.

Kegiatan 2: Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis Unggulan, dengan fokus pada Peningkatan Produktivitas Komoditas Lada, Pala, Cengkeh, dan Nilam.

Keempat komoditas tersebut merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang memiliki permintaan tinggi secara global, dengan sejarah panjang sebagai komoditas ekspor sejak masa kolonial. Hilirisasi komoditas lada, pala, cengkeh, dan nilam sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketergantungan pada pasar mentah dan mendorong transformasi ekonomi berbasis bioresources.

Kegiatan 3: Korporasi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (KPN) dengan fokus pada Peningkatan Produktivitas Komoditas Lada, Pala, Cengkeh, dan Nilam.

KPN adalah bentuk kelembagaan ekonomi kolektif petani, nelayan, pembudidaya, atau petambak yang berbasis koperasi atau BUMDes/BUMDesma, yang memiliki sistem usaha terintegrasi dari hulu ke hilir. Fungsi utama KPN adalah menggabungkan kekuatan produksi, pembiayaan, distribusi, dan pemasaran dalam satu kelembagaan yang efisien dan profesional. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan skala ekonomi petani rempah, mendorong produktivitas dan kualitas komoditas strategis seperti Lada, Pala, Cengkeh, dan Nilam, membangun industri rempah nasional dari desa dan mengurangi ketergantungan pada perantara dan pasar spekulatif.

Kegiatan 4: Pertanian Berkelanjutan, dengan fokus pada Pengembangan Desa Organik Komoditas Perkebunan.

Dewasa ini permintaan global terhadap produk organik semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan perubahan konsumen dunia yang semakin sadar akan kesehatan dan lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Oleh karenanya pengembangan Desa Organik Komoditas Perkebunan sangat penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan, mendorong pertanian berkelanjutan berbasis lingkungan, memberdayakan petani secara ekonomi dan kelembagaan serta menyediakan produk perkebunan yang sehat yang memiliki pasar global.

Kegiatan 6: Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan secara selaras dengan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat delapan area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan “Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian” merupakan kontribusi Ditjen Perkebunan dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Provinsi Jambi yaitu : **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi akan mendukung terlaksananya Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jambi serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

1. Meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan;

3.1.2 Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi jambi

1. Peningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

3.1.3 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan

- **Luas tanaman perkebunan**, diukur berdasarkan jumlah tegakan pohon di lokasi kebun dibagi dengan jumlah tegakan pohon dalam satuan hektar.
- **Produksi tanaman perkebunan**, diukur dalam wujud bahan olahan setengah jadi seperti ; Sawit dalam wujud CPO, Karet dalam wujud Slab, Kopi dalam wujud kopi berasan, Pinang dalam wujud biji kering, Kelapa dalam wujud Kopra, Kayumanis dalam wujud Kulit kering, Kakao dalam wujud biji kering. Formulasi Perhitungan : jumlah produksi komoditas unggulan tanaman perkebunan tahun berkenaan.
- **Produktivitas tanaman perkebunan**, diukur dengan formulasi perhitungan Jumlah Produksi dibagi dengan Luas kebun dengan satuan ton/ha.

3.1.4 Meningkatkan pendapatan petani, buruh tani dan pekerja lainnya.

Untuk menghitung pendapatan petani, buruh tani dan pekerja lainnya dilakukan dengan menghitung :

- **NTP sub sektor Perkebunan.**
Formulasi perhitungan : Data BPS
- **Tingkat pendapatan petani komoditas unggulan tanaman perkebunan (Rp/th).**
Formulasi perhitungan : Rata-rata harga komoditi tanaman perkebunan tahun berkenaan dikali jumlah produksi dibagi 12 (dua belas) bulan.
- **Tingkat kapasitas SDM Petani tentang mutu hasil,**
Formulasi perhitungan berdasarkan kegiatan Bimtek dan Sosialisasi.
- **Cakupan Pengendalian OPT Perkebunan,**
Formulasi perhitungan berdasarkan kegiatan penanganan laporan pengaduan masyarakat terkait serangan hama penyakit tanaman perkebunan di lokasi kebun.

- **Gangguan Usaha Perkebunan,**

Formulasi perhitungan berdasarkan kegiatan penanganan laporan pengaduan Perusahaan dan masyarakat terkait adanya kasus penyalahgunaan perkebunan di lokasi perkebunan Perusahaan.

3.1.5 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik

Terwujudnya peningkatan Nilai AKIP OPD

- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

- Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Formulasi Perhitungan Nilai Skor IKM OPD dengan menggunakan “ nilai rata-rata tertimbang “ terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, dengan rumus :

Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$

$$\text{IKM} = \frac{\{\text{Total dari nilai Pesepsi Per Unsur}\}}{\text{Total Unsur Yang Terisi} \times \text{Nilai Penimbang}}$$

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	Target Tahun						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya produktivitas bidang pertanian, perdagangan. Industri dan pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Subsektor Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Pada Lapangan Usaha Subsektor Perkebunan	27,80	27,80	28,20	29,20	30,80	32,20	33,50	
			Persentase Peningkatan Produktivitas komoditas Unggulan Perkebunan	0,05	0,10	0,20	0,25	0,31	0,37	0,44	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam menentukan strategi dilakukan dengan evaluasi faktor-faktor lingkungan strategi yang mempengaruhi dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weakness*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*). Berdasarkan analisis SWOT dan pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

3.2.1 Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

3.2.2 Memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio- industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya.

3.2.3 Peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan kualitas implementasi Akuntabilitas kinerja.

Strategi peningkatan pelayanan publik dan implementasi akuntabilitas kinerja diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. serta Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

3.2.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan perkebunan serta kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2025-2029 adalah :

3.2.5 Kebijakan Umum

2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara berkelanjutan
3. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
5. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
6. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan Kawasan
7. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan ditataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan

komoditas perkebunan

10. Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun sosial.
11. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

3.2.6 Kebijakan Teknis

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk memfokuskan pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap sumber penerimaan negara seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, pinang kakao, dan kulit kayu manis. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan tersebut dipilih pada lahan-lahan eksisting dan bukaan baru yang sesuai dengan potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah. Fokus pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dipersyaratkan layak secara ekonomi, layak bio-fisik(agro-ecosystem), layak sosial, layak pasar dan layak pengembangan atau memiliki potensi keberlanjutan. Pengembangan komoditas tersebut diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas
2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan teknologi melalui adopsi teknologi kepada petani dengan penyediaan alat dan mesin pertanian, melakukan surveylance dan pengujian hama dan penyakit tanaman perkebunan, pemantauan, pengawasan dan pengujian pupuk dan pestisida, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, pengembangan

dan pengujian mutu benih, intensifikasi , pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, pengelolaan lahan dan air melalui normalisasi saluran drainase serta pembangunan dan rehabilitasi jalan produksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman.

3. Meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil tanaman perkebunan dengan memfasilitasi unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya klaster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk perkebunan, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui pembinaan pengolahan mutu produk petani dan pelaku usaha agribisnis serta meningkatkan akses kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar.
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat, guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Usaha yang akan ditempuh meliputi :
 - Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani serta petugas/aparatur melalui pelatihan.
 - Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)
 - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel dan profesional.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan CPCL koordinasi dan bimtek ke KT	1 Pelaksanaan CPCL koordinasi dan bimtek ke KT	1 Pelaksanaan CPCL koordinasi dan bimtek ke KT	1 Pelaksanaan CPCL koordinasi dan bimtek ke KT	1 Pelaksanaan CPCL koordinasi dan bimtek ke KT
2	Penyediaan sarana dan prasarana yang tepat	2 Penyediaan sarana dan prasarana yang tepat	2 Penyediaan sarana dan prasarana yang tepat	2 Penyediaan sarana dan prasarana yang tepat	2 Penyediaan sarana dan prasarana yang tepat
3	Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pendampingan	3 Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pendampingan	3 Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pendampingan	3 Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pendampingan	3 Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pendampingan
4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produktivitas bidang pertanian, perdagangan. Industri dan pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Subsektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha subsektor Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perkebunan dan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Jambi serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Jambi, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan tanaman perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian
- c. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian
- d. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian.

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ialah program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam berbagai bidang bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatkan transparansi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memenuhi pelayanan administrasi kantor yang kegiatannya meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan Sarana Tanaman Perkebunan. Meningkatkan produktivitas perkebunan dengan menyediakan sarana produksi yang memadai. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dengan menggunakan teknologi dan sarana yang tepat. Meningkatkan ketersediaan benih. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

2. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian

- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ;

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian lainnya.
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian.

- Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman ;

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih.
- Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman Perkebunan.
- Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Batang.

- Pengelolaan Sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme Kewenangan Provinsi ;

Sub Kegiatan :

- Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme.
- Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

3. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian

- Penataan Prasarana pertanian/perkebunan ;

Sub Kegiatan :

- Perencanaan, pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditi Perkebunan.
- Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jalan Usaha Tani (JUT).
- Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi (TAM) di tingkat Usaha tani.
- Koordinasi dan Sikronisasi penataan Prasarana pendukung pertanian lainnya.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana pendukungnya.
- Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT serta Mengurangi risiko bencana perkebunan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi petani dan masyarakat. Meningkatkan ketahanan perkebunan terhadap bencana alam dan non-alam, seperti kebakaran, kekeringan, banjir, dan serangan hama. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan.
- Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan.
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun, Gangguan Usaha Tanaman (GUP) pangan, hortikultura, dan Perkebunan.
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota

Program Penyuluh Pertanian bertujuan untuk Meningkatkan Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN non ASN, Swadaya dan Swasta serta Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi dan inovasi perkebunan terbaru. Meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola usaha perkebunan. Meningkatkan produktivitas perkebunan dengan menerapkan teknologi dan inovasi yang tepat. Meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil perkebunan. Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan pendapatan petani adapun kegiatannya sebagai berikut :

6. Program Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian;

Sub Kegiatan :

- Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.
- Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.

- Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian;

Sub Kegiatan :

- Diseminasi informasi teknis, sosial ekonomi dan inovasi pertanian.
- Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani.

- Pengembangan kapasitas Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan;

Sub Kegiatan :

- Pendampingan dan pengawalan Korporasi petani.
- Pembentukan dan penguatan kelembagaan Korporasi petani.

Adapun Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan/ Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya produktivitas bidang pertanian, perdagangan. Industri dan pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Subsektor Perkebunan	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perkebunan	Peningkatan pendapatan petani dan peningkatan kualitas produksi hasil perkebunan	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Pada Lapangan Usaha Subsektor Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
						Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
						Penataan Prasarana Pertanian	
						Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
						Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
						Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
						Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	

Tabel. 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Unit Kerja
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,45	75,20	18.400.000.000	75,50	18.500.000.000	76,50	19.200.000.000	77,00	19.700.000.000	80,00	20.200.000.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks)	84,72	88,20		89,00		89,50		89,70		90,00		
	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD (Nilai)	70,20	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran, Pelaporan, Evaluasi dan Data Perkebunan yang berkualitas	100 Persen	100 Persen	720.000.000	100 Persen	720.000.000	100 Persen	720.000.000	100 Persen	720.000.000	100 Persen	720.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	Disbun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	220.000.000	3 Laporan	220.000.000	3 Laporan	220.000.000	3 Laporan	220.000.000	3 Laporan	220.000.000	Disbun
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	Disbun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Akuntansi dan Keuangan	100 Persen	100 Persen	14.450.000.000	100 Persen	14.450.000.000	100 Persen	14.750.000.000	100 Persen	14.950.000.000	100 Persen	14.950.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Organg	85 Organg	13.800.000.000	85 Organg	13.800.000.000	86 Orang	14.100.000.000	90 Orang	14.300.000.000	90 Orang	14.300.000.000	Disbun
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	Disbun
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Disbun
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Aset Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Disbun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaianya	100 Persen	100 Persen	183.500.000	100 Persen	183.500.000	100 Persen	183.500.000	100 Persen	183.500.000	100 Persen	183.500.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	190 Stel	108.500.000	190 Stel	108.500.000	190 Stel	108.500.000	190 Stel	108.500.000	190 Stel	108.500.000	Disbun
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10 Orang	75.000.000	10 Orang	75.000.000	10 Orang	75.000.000	10 Orang	75.000.000	10 Orang	75.000.000	Disbun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor	100 Persen	100 Persen	688.250.000	100 Persen	688.250.000	100 Persen	787.250.000	100 Persen	787.250.000	100 Persen	787.250.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	30.500.000	6 Paket	30.500.000	6 Paket	31.000.000	6 Paket	31.000.000	6 Paket	31.000.000	Disbun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	Disbun

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	NDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Unit Kerja
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	56.500.000	5 Paket	56.500.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	Disbun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.250.000	2 Paket	26.250.000	2 Paket	26.250.000	2 Paket	26.250.000	2 Paket	26.250.000	Disbun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Disbun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	Disbun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	550.000.000	100 Persen	550.000.000	100 Persen	628.250.000	100 Persen	718.250.000	100 Persen	718.250.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	Disbun
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	5 Paket	148.250.000	5 Paket	148.250.000	5 Paket	148.250.000	Disbun
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit	80.000.000	4 Unit	80.000.000	4 Unit	80.000.000	8 Unit	120.000.000	8 Unit	120.000.000	Disbun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	685.000.000	100 Persen	685.000.000	100 Persen	685.000.000	100 Persen	725.000.000	100 Persen	725.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	Disbun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	360.000.000	3 Laporan	360.000.000	3 Laporan	360.000.000	3 Laporan	400.000.000	3 Laporan	400.000.000	Disbun
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Disbun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.223.250.000	100 Persen	1.323.250.000	100 Persen	1.546.000.000	100 Persen	1.716.000.000	100 Persen	2.216.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	44 Unit	400.000.000	44 Unit	400.000.000	44 Unit	400.000.000	44 Unit	400.000.000	44 Unit	400.000.000	Disbun
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	123.250.000	50 Unit	123.250.000	50 Unit	146.000.000	50 Unit	150.000.000	50 Unit	160.000.000	Disbun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5 Unit	700.000.000	5 Unit	800.000.000	6 Unit	1.000.000.000	7 Unit	1.166.000.000	10 Unit	1.656.000.000	Disbun

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Unit Kerja
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukan Kab/Kota	15 Persen	16 Persen	16 Persen	10.850.000.000	17 Persen	11.500.000.000	19 Persen	12.200.000.000	21 Persen	12.600.000.000	23 Persen	13.000.000.000	
	Presentase Peningkatan Produksi komoditas Unggulan Perkebunan	1 Persen	1,13 Persen	2,29 Persen		2,31 Persen		2,33 Persen		2,36 Persen		2,38 Persen		
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian yang terawasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	350.000.000	100 Persen	450.000.000	100 Persen	450.000.000	100 Persen	450.000.000	100 Persen	450.000.000	
	Persentase Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida dan Sarana Perkebunan yang Terawasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	
	Persentase Pengawasan Sarana Perkebunan yang Terkoordinasi dan Tersinkronisasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	10 Laporan	200.000.000	10 Laporan	200.000.000	10 Laporan	200.000.000	10 Laporan	200.000.000	Disbun
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	Disbun
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan Bersertifikat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.250.000.000	100 Persen	10.450.000.000	100 Persen	11.050.000.000	100 Persen	11.250.000.000	100 Persen	11.550.000.000	
	Jumlah Permohonan Penerbitan Sertifikat yang Diterbitkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	650.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	750.000.000	
	Persentase Benih Komoditi Unggulan Perkebunan Beredar Bersertifikat yang Terawasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
	Persentase Benih Komoditi Unggulan Perkebunan Beredar Bersertifikat yang Teruji	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
	Persentase Mutu dan Ketersediaan Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar yang Terawasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.700.000.000	100 Persen	7.850.000.000	100 Persen	7.900.000.000	100 Persen	8.050.000.000	100 Persen	8.300.000.000	
	Persentase Mutu dan Ketersediaan Benih Tanaman Tahunan yang Terawasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
	Jumlah Permohonan Benih Bersertifikat yang Diterima	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	
	Persentase Benih Unggul Bersertifikat Komoditi Perkebunan yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
	Persentase Benih Unggul Bersertifikat Komoditi Perkebunan yang Tersalurkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	185 Sertifikat	185 Sertifikat	185 Sertifikat	550.000.000	185 Sertifikat	600.000.000	195 Sertifikat	650.000.000	205 Sertifikat	700.000.000	215 Sertifikat	750.000.000	Disbun
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	7.700.000.000	5 Laporan	7.850.000.000	6 Laporan	7.900.000.000	6 Laporan	8.050.000.000	6 Laporan	8.300.000.000	Disbun
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-	115.000 Batang	80.000 Batang	2.000.000.000	80.000 Batang	2.000.000.000	100.000 Batang	2.500.000.000	100.000 Batang	2.500.000.000	100.000 Batang	2.500.000.000	Disbun
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	600.000.000	100 Persen	700.000.000	100 Persen	900.000.000	100 Persen	1.000.000.000	
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	-	-	-		1 VUB	100.000.000	1 VUB	100.000.000	1 VUB	100.000.000	1 VUB	100.000.000	Disbun
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	250.000.000	4 Laporan	500.000.000	4 Laporan	600.000.000	4 Laporan	800.000.000	5 Laporan	900.000.000	Disbun

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Unit Kerja
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukan Kab/Kota	7 Persen	7 Persen	8,5 Persen	7.550.000.000	9 Persen	10.600.000.000	9,5 Persen	10.700.000.000	10 Persen	11.600.000.000	10,5 Persen	11.000.000.000	
	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produk Perkebunan	3 Persen	3 Persen	3,6 Persen		3,7 Persen		3,8 Persen		3,9 Persen		4,2 Persen		
Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang ditata	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.550.000.000	100 Persen	10.600.000.000	100 Persen	10.700.000.000	100 Persen	11.600.000.000	100 Persen	11.000.000.000	
	Persentase Prasarana Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan yang Terstandarisasi dan Terawasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	2.000.000.000	
	Persentase Prasarana Pemasaran Hasil Perkebunan yang Ditata	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
	Persentase Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang Ditata	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.800.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	
	Persentase Peningkatan Kawasan Perkebunan Komoditi Non Unggulan yang Ditata	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.000.000.000	100 Persen	3.500.000.000	100 Persen	3.600.000.000	100 Persen	3.700.000.000	100 Persen	4.600.000.000	
	Persentase Peningkatan Kawasan Perkebunan Komoditi Unggulan yang Ditata	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
	Persentase Penataan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan yang Direncanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	300.000.000	
	Persentase Prasarana Pascapanen Perkebunan yang Ditata	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.000.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	
	Persentase Prasarana Berbentuk Gedung yang Ditata	-	-	-	-	100 Persen	1.750.000.000	100 Persen	1.250.000.000	100 Persen	2.000.000.000	-	-	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	Disbun
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	JumlahKoordinasi,Sinkronisasi sidan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	-	-	-		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Disbun
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.500.000.000	4 Laporan	1.500.000.000	4 Laporan	1.500.000.000	4 Laporan	1.500.000.000	5 Laporan	2.000.000.000	Disbun
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi.	-	-	-	-	3 Unit	1.750.000.000	2 Unit	1.250.000.000	3 Unit	2.000.000.000	-	-	Disbun
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-	-	100 Hektar	3.000.000.000	125 Hektar	3.500.000.000	125 Hektar	3.600.000.000	130 Hektar	3.700.000.000	170 Hektar	4.600.000.000	Disbun
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	-	5 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit	1.500.000.000	Disbun
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit	5 Unit	15 Unit	1.800.000.000	17 Unit	2.000.000.000	20 Unit	2.500.000.000	20 Unit	2.500.000.000	20 Unit	2.500.000.000	Disbun

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Unit Kerja
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Area Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan (Ha)	225 Hektar	425 Hektar	425 Hektar	6.000.000.000	650 Hektar	7.000.000.000	650 Hektar	7.100.000.000	650 Hektar	7.100.000.000	650 Hektar	7.200.000.000	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Gangguan Usaha Perkebunan	21 Persen	23 Persen	23 Persen	6.000.000.000	25 Persen	7.000.000.000	26 Persen	7.100.000.000	27 Persen	7.100.000.000	30 Persen	7.200.000.000	
	Persentase Peningkatan Luasan Pengendalian Terdampak Serangan OPT Perkebunan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	600.000.000	100 Persen	800.000.000	100 Persen	800.000.000	100 Persen	800.000.000	100 Persen	800.000.000	
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan yang Dilaporkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan						
	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Gangguan Usaha Perkebunan	21 Persen	22 Persen	23 Persen	5.200.000.000	25 Persen	5.800.000.000	26 Persen	5.900.000.000	27 Persen	5.900.000.000	30 Persen	6.000.000.000	
	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Lahan Perkebunan	21 Persen	22 Persen	23 Persen		25 Persen		26 Persen		27 Persen		30 Persen		
	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Inisiasi Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Perkebunan	21 Persen	22 Persen	23 Persen	200.000.000	25 Persen	400.000.000	26 Persen	400.000.000	27 Persen	400.000.000	30 Persen	400.000.000	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	75 Hektar	75 Hektar	125 Hektar	600.000.000	200 Hektar	800.000.000	200 Hektar	800.000.000	200 Hektar	800.000.000	200 Hektar	800.000.000	Disbun
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Hektar	50 Hektar	100 Hektar	200.000.000	200 Hektar	400.000.000	200 Hektar	400.000.000	200 Hektar	400.000.000	200 Hektar	400.000.000	Disbun
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Hektar	100 Hektar	200 Hektar	5.200.000.000	250 Hektar	5.800.000.000	250 Hektar	5.900.000.000	250 Hektar	5.900.000.000	250 Hektar	6.000.000.000	Disbun
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi	80 Persen	81 Persen	82 Persen	400.000.000	84 Persen	600.000.000	85 Persen	700.000.000	87 Persen	700.000.000	89 Persen	700.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan rekomendasi teknis dan pembinaan usaha perkebunan yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Disbun
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-	-	-	-	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Disbun
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh yang Ditingkatkan	4,08 Persen	6,12 Persen	6,16 Persen	2.000.000.000	10,2 Persen	2.000.000.000	12,2 Persen	2.050.000.000	14,28 Persen	2.050.000.000	16,32 Persen	2.050.000.000	
	Persentase Kelembagaan Petani Pekebun yang dibentuk dan dibina	1 Persen	1,1 Persen	1,2 Persen		1,3 Persen		1,4 Persen		1,5 Persen		1,6 Persen		
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.500.000.000	
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	46 Orang	46 Orang	52 Orang	1.500.000.000	52 Orang	1.500.000.000	52 Orang	1.500.000.000	52 Orang	1.500.000.000	52 Orang	1.500.000.000	Disbun
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan kompetensi Petani Milenial Perkebunan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Disbun
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Presentase lembaga pelaku usaha perkebunan yang aktif	100 Persen	100 Persen	100 Persen	400.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	400.000.000	
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	10 Unit	10 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Disbun
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	10 Unit	10 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Disbun
Jumlah					45.200.000.000		50.200.000.000		51.950.000.000		53.750.000.000		54.150.000.000	

Dalam rangka mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2025–2029 maka Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memerlukan beberapa Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Pengawasan Sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian lainnya.	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
			Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
			Pengelolaan Sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme Kewenangan Provinsi	
			Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme	
			Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Penataan Prasarana pertanian	
			Perencanaan, pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditi Perkebunan	
			Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jalan Usaha Tani (JUT)	
			Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi (TAM) di tingkat Usaha tani	
			Koordinasi dan Sikronisasi penataan Prasarana pendukung pertanian lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana pendukungnya	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang TanamanPangan,Hortikultura dan Perkebunan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perkebunan besar yang berizinusaha yang terbina dan terawasi	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan TeknisIzinUsahaPertaniandi Lintas Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh perkebunan	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
			Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	
			Diseminasi informasi teknis, sosial ekonomi dan inovasi pertanian	
			Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	
			Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	
			Pengembangan kapasitas Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	
			Pendampingan dan pengawalan Korporasi petani	
			Pembentukan dan penguatan kelembagaan Korporasi petani	

4.1.2 Program/Kegiatan Prioritas Dinas Perkebunan

Program/Kegiatan Prioritas merupakan Program/Kegiatan yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program/Kegiatan prioritas pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas serta meningkatnya nilai tambah hasil produk perkebunan juga mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian. Adapun Program/Kegiatan Prioritas Dinas Perkebunan Provinsi Jambi periode 2025-2029 diantaranya:

- 1) Pengembangan tanaman perkebunan di 10 Kabupaten/kota
- 2) Peremajaan tanaman perkebunan di 10 Kabupaten/kota
- 3) Peningkatan kualitas mutu benih tanaman perkebunan
- 4) Ketersediaan benih unggul dan bersertifikat
- 5) Intensifikasi tanaman perkebunan di 10 Kabupaten/kota
- 6) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan di 10 Kabupaten/kota
- 7) Luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT
- 8) Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan
- 9) Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun
- 10) Promosi komoditas dan produk perkebunan
- 11) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
- 12) Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Pada Lapangan Usaha Subsektor Perkebunan	Persen	27,80	28,20	29,20	30,80	32,20	33,50
2	Persentase Peningkatan Produktivitas komoditas Unggulan Perkebunan	Persen	0,10	0,20	0,25	0,31	0,37	0,44

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Produksi Komoditi Perkebunan							
	Produksi Karet	TON	334.829	333.742	333.742	333.742	333.742	333.742
	Produksi Kelapa Sawit	TON	1.312.009	1.323.120	1.330.010	1.345.420	1.352.120	1.362.430
	Produksi Kopi	TON	21.937	23.518	25.380	27.584	30.207	33.341
	Produksi Kayu Manis	TON	30.620	30.727	30.835	30.943	31.051	31.160
	Produksi Kelapa	TON	117.226	118.693	120.178	121.682	123.205	124.746
	Produksi Pinang	TON	32.107	32.107	32.107	32.107	32.107	32.107
	Produksi Kakao	TON	723	723	723	723	723	723
2	Produktivitas Komoditi Perkebunan							
	Produktivitas Karet	Kg/Ha	891	891	891	891	891	891
	Produktivitas Kelapa Sawit	Kg/Ha	3.010	3.020	3.050	3.070	3.090	3.105
	Produktivitas Kopi	Kg/Ha	794	811	829	848	867	887
	Produktivitas Kayu Manis	Kg/Ha	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
	Produktivitas Kelapa	Kg/Ha	1.224	1.228	1.233	1.237	1.242	1.246
	Produktivitas Pinang	Kg/Ha	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
	Produktivitas Kakao	Kg/Ha	539	539	539	539	539	539
3	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	HA	75,00	75,00	75,00	75,00	100	100
4	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	HA	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00	80,00

Pengembangan komoditas perkebunan di Provinsi Jambi belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (4) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) Belum tertibnya permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani. Permasalahan lainnya juga ditemukan antara lain keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB Provinsi Jambi. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang terarah, terpadu, dan bersinergi antar sub sektor/sektor terkait, dengan tetap mempedomani dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu mendatang.

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 serta isu-isu bidang tanaman Perkebunan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk jangka waktu 2025-2029. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025- 2029 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Perkebunan ini dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk tahun 2025 - 2029, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi.